

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 sudah menggunakan aplikasi perencanaan sejak musrenbang hingga usulan renja dan proses disetujui lewat rkpd, hubungan antara entry data dengan TAPD selalu upto date lewat komunikasi angka di RKPD 2019 dengan angka di RENJA PERUBAHAN 2018. Usulan penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dengan menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga maksud dan tujuan tercapai sesuai dengan sasaran.

Perumusan Tujuan dan Sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu, sehubungan berpedoman Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **b. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekalongan adalah :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan

dan penganggaran, RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA PPAS untuk menyusun APBD Tahun 2019.

3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang pemberlakuaanya mulai tanggal 2 Januari 2017.

#### C. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah yang didasarkan pada penalaahan rancangan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2019 yang rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan Urusan Pelayanan Pilihan Komunikasi dan Informatika yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2019 ini disusun dengan tujuan untuk menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Daerah dengan anggaran pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

#### D. Sistematika Penulisan

Secara sistematis RENJA pada Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai berikut :

##### BAB I Pendahuluan

- a) Latar Belakang
- b) Landasan Hukum
- c) Maksud dan Tujuan
- d) Sistematika Penulisan

## BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- a) Evaluasi Pelaksana Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-VI.C.6)
- b) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-VI.C.1)
- c) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- d) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-VI.C.9)

## BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan memuat :

- a) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- b) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- c) Program dan Kegiatan (Tabel T-VI.C.10)

## BAB IV Penutup.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN

#### RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

##### A. Evaluasi Pelaksana Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstranya.

Pada **Tabel T-VI. C.6.**

Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan merupakan awal atas perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, di Tahun 2018 sesuai dengan Perubahan RPJMD 2016 – 2021 Dinas Kominfo mengalami penambahan urusan dari sebelumnya hanya urusan Komunikasi dan Informatika bertambah urusan Statistik dan urusan Persandian. Oleh karena itu indikator yang terpasang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo semula ada 11 indikator diringkas menjadi 4 indikator sasaran, yang tidak mengurangi kinerja bahkan menfokuskan kinerja secara cascading yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2016-2021. Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu Dinas Kominfo telah mencapai 93,82% dalam Belanja Langsung dari 60 Kegiatan.

Sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Dinas Kominfo mempunyai 2 indikator Kinerja Utama, diantaranya :

1. Nilai keterbukaan informasi publik Kota Pekalongan
2. Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi.

Sedangkan urusan Dinas Kominfo mempunyai 3 urusan terkait program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### A. Urusan Komunikasi dan Informatika, meliputi 4 sarana, yakni :

A.1. Sekretaris, sasaran indikatornya adalah Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tingkat Kematangan Impelementasi SPIP, hal ini meliputi 4 program, dengan rincian penjelasan :

A.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 10 kegiatan, dengan indikator program :

Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi sudah tercukupi 12 bulan

A.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdapat 4 kegiatan

Indikator Program :

Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga.

A.1.3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator Program :

Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja berupa dokumen Renja, RKA (Penetapan dan Perubahan), DPA, SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP), LPPD, LKPJ, dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD bulanan

A.1.4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat, terdapat 2 kegiatan :

Indikator Program :

Persentase kehadiran aparatur.

B.1. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah (disingkat Bidang PIISDA) mempunyai 1 sasaran dengan indikatornya adalah Jumlah penyelenggaraan capacity building bidang TIK bagi kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholder, hal ini meliputi 2 program, dengan rincian penjelasan :

B.1.1. Program Pengembangan Infrastruktur TIK, meliputi 3 Indikator Program :

- a) Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO)
- b) Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustu dll)
- c) Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)

B.1.2. Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah, meliputi 3 Indikator Program, yakni :

- a) Persentase Data Statistik Sektor Yang Tercakup dalam Publikasi Data

## Statistik Tahunan

- b) Prosentase produsen data (OPD) yang berkontribusi dalam sistem satu data
- c) Persentase OPD yang melakukan pengumpulan dan publikasi data sektoral (Profil OPD)

C.1. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian (disingkat PSIP) mempunyai 1 sasaran yang sama dengan Bidang PIISDA dengan indikatornya adalah Jumlah penyelenggaraan capacity building bidang TIK bagi kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholder, hal ini meliputi 2 program, dengan rincian penjelasan :

C.1.1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, meliputi 3 Indikator Program, yakni :

- a) Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi .
- b) Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi.

C.1.2. Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi 3 Indikator Program, yakni :

- a) Persentase berita daerah yang lancar aman dan terjaga kerahasiannya.

D.1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (disingkat Bidang PIKP), sasaran indikatornya adalah Persentase OPD menerapkan KIP dengan Kategori “Cukup Informatif/Baik” dan Prosentase OPD dengan IKM “Baik”, hal ini meliputi 2 program, dengan rincian penjelasan :

D.1.1. Program Pengelolaan Desiminasi Informasi, Kerjasama Media dan Media Penguatan Sumber Informasi Publik, meliputi 2 Indikator Program,yakni :

- a) PerPersentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
- b) Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.

D.1.2. Program Pengelolaan Pengelolaan Pengaduand an Aspirasi Masyarakat, dan penguatan KIP, meliputi 2 Indikator Program,yakni :

- a) Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik".
- b) Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat .

#### B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-VI.C1)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2018 Kota Pekalongan berdasarkan perumusan terdapat 10 indikator kinerja yang dicapai sebagai berikut :

B.1. Nilai ketrbukaan informasi Publik Kota Pekalongan dengan target capaian Nilai=70 dan tercapai 70 dengan didukung konten web berisikan ppid.pekalongankota.go.id didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang semua OPD bisa mengirim standart informasi yang di publikasi secara online.

B.2. Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan target Kelompok=15 karena masih proses pelaksanaan sehingga yang dilaporkan baru tercapai 10 kelompok, diantaranya :

1. Himpaudi,
2. MI pringlangu
3. SMK IN
4. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim
5. Ikatan Wanita Pengusaha
6. Arah
7. Relawan TIK
8. Open Source
9. Kelurahan
10. Kecamatan

#### C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting urusan Komunikasi dan Informatika mencakup pembinaan, pelayanan,

pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan :

a. Isu tentang Perkembangan Batik TV.

Perkembangan Batik TV sangat perlu ditingkatkan meskipun kondisi peralatan penguat frekuensi sudah ditambah pemancar sesuai dengan standar frekuensi/sinyal dikuatkan juga menara disatukan dengan ketinggian 60 meter dibangun dengan terpadu menara Radio RKB, Televisi dan jaringan Batik.net Kominfo, sehingga untuk keperluan tersebut di anggarakan dalam RENJA tahun 2019 sebesar Rp. 800 juta.

b. Isu tentang Operasionalisasi Command Center.

Setelah terbangunnya sarana gedung oleh Bagian Rumah Tangga Setda, maka perlu difungsikan dalam pengisian command com sebagai command center (pusat kendali) yang peralatannya sebagian sudah ada seperti di Dinas Perhubungan berkaitan dengan pusa kendali CCTV, Display wall (layar lebar di Dinas Kominfo sudah tersedia) dan tahun 2018 sudah dianggarkan untuk menyediakan jaringan hub dan kabel beserta connector sebagai penghubung peralatan untuk disambungkan ke layar lebar guna dipantau dan sebagai sediaan Walikota sebagai bantuan dalam menyikapi atau menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kinerja kantor di seluruh OPD Kota Pekalongan. Pantauan bisa meliputi jalan, tempat strategis (pasar, terminal, layanan di OPD seperti Dukcapil, perijinan, Rumah Sakit dll)

c. Isu tentang master plan smart city

Tahun 2018 Dinas Kominfo telah melakukan MOU dengan PT. Jasmita Telekomindo Jakarta terkait smartcity yang awalnya tahun 2018 gratis dan tahun selanjutnya menyewa sebesar Rp. 180 juta akan tetapi pemanfaatannya bisa menjadi surplus dan dibantu dalam mengiklankan pengguna smartcity ke swasta untuk menjadi tambahan pendapatan sehingga meningkatnya kesejahteraan keluarga khususnya masyarakat Kota Pekalongan.

d. Isu tentang Call Center 112

Tahun 2018 Call Center 112 sudah dianggarkan 75 juta dengan harapan yang telah dijanjikan daerah akan di dropping peralatan Call Center dari Pusat akan tetapi kebijakan berubah hanya di Daerah tertinggal yang mendapatkan sarana peralatan Call Center. Oleh karena itu Dinas Kominfo harus mengadakan peralatan Call Center

sendiri lewat penawaran PT. Jasmita, disampaikan selain jasa sewa aplikasi Call Center 112 merupakan gabungan dari Call Centetr 110 (Polisi), 113 (Damkar), 118 (Ambulan), 119 (Kesehatan), 115 (Basarnas).

e. Keamanan Informasi

Dinas Kominfo Tahun 2019 menambah pagu pada kegiatan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi sebesar Rp. 200.000.000,- guna menyusun ISO singkatan dari The International Organization for Standardization, penulisannya bakunya adalah ISO. (SIM/ISO/IEC/27001) Tehnical Framework). Sehubungan dengan itu Penyusunan Kajian Kerangka Tehnis Perencanaan Integrasi Aplikasi Kota Pekalongan (e-Goverment Aplication Integrastion Technical Framework).

D. Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat (Tabel T.VI. C9)

Dinas Kominfo Kota Pekalongan sampai dengan akhir tahun 2017 telah melaksanakan seluruh program/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dengan capaian realisasi 93,12% dari 60 kegiatan. Adapun pemangku kepentingan dalam pencapaian kinerja yang diuraikan dalam sasaran strategis dan hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

D.1. Kegiatan yang bergeser antar program dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 karena tidak sesuai dengan indikator sasaran, diantaranya :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media media (15.00)

Kegiatan yang bergeser :

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi  
(– PINDAH PROGRAM 19.021)
- Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat (– PINDAH PROGRAM 18.013)

2. Program kerjasama informasi dengan mas media (18.00), kegiatan yang bergeser :

- Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik

(–PINDAH PROGRAM 23.031)

- Pengelolaan Konten dan Update Layanan Informasi Website / Subdomain SKPD

(– PINDAH PROGRAM 23.032

3. Program Pengembangan Infrastruktur TIK (19.00)

- Fasilitasi Lanjutan Migrasi Aplikasi/SIMKOTA Batik Keuangan Daerah berbasis FOSS – (– PINDAH PROGRAM 23.033)

4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (23.00)

- Pengembangan jaringan SIMDA (– PINDAH PROGRAM 19.022)
- Pengadaan sarana pengelolaan jaringan (– PINDAH PROGRAM 19.023)
- Pemberdayaan dan Pembinaan Sumber Daya Informatika (– PINDAH PROGRAM 19.021)

D.2. Kegiatan yang hilang ditahun berikutnya (tahun 2017 ada namun tahun 2018 tidak ada) adalah :

1. Pembangunan gedung kantor
2. Penyusunan revisi renstra
3. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial
4. Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah
5. Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan informasi jaringan TIK Sekolah

D.3. Kegiatan baru (di tahun 2017 tidak ada namun tahun 2018 ada) adalah :

1. Penyusunan Profil Perangkat Daerah
2. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
3. Forum Badan Koordinasi Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (Bakordikspasi).
4. Pengelolaan Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan publik dan

#### Pengaduan Masyarakat.

5. Pembinaan dan Pemberdayaan Forum Komunikasi Mitra (Media Tradisional)
6. Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK
7. Operasionalisasi Command center
8. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
9. Pengelolaan aplikasi Simpatiik
10. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)

D.4. Usulan Kegiatan yang dalam (RENJA) 2019 yang tidak sesuai dengan RKPD, sebagai berikut:

1. . Usulan yang menjadi Prioritas 2 (P2)

- Kegiatan : Pembangunan gedung kantor diusulkan 1.596.555.000,-
- Kegiatan : Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi Rp. 50.000.000

2. Usulan yang menjadi Prioritas 1 (P1) tetapi kurang dari plafon usulan anggaran

- Kegiatan : Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika diusulkan 25 juta akan tetapi dihapus/hilang
- Kegiatan : Pengembangan database TIK diusulkan Rp. 35 juta menjadi Rp. 25Juta
- Kegiatan : Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS semula diusulkan Rp. 88 juta menjadi Rp.70juta
- Kegiatan : Faslitasi layanan SIM Rujukan Terpadu diusulkan Rp. 25Juta menjadi Rp. 22,5juta
- Kegiatan : Fasilitasi pengembangan Inovasi/Iptek diusulkan Rp. 45Juta menjadi nol dikarenakan ada penggabungan kegiatan
- Kegiatan : Fasilitasi pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika diusulkan Rp. 96 juta menjadi Rp. 86,5 juta
- Kegiatan : Pengelolaan SIMPATIIK diusulkan Rp. 58,5juta menjadi Rp.30juta

- Kegiatan : Fasilitasi lanjutan migrasi aplikasi keuangan Daerah berbasis FOSS diusulkan Rp, 40juta menjadi hilang/dinolkan
- Kegiatan : Penyebarluasan informasi pembangunan daerah diusulkan Rp. 85Juta menjadi Rp. 80Juta
- Kegiatan Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan {erencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustaka) diusulkan Rp.45juta menjadi Rp.40juta
- Kegiatan : Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi metra (Media Tradisional) diusulkan Rp.57juta menjadi Rp.55juta

3. Usulan yang menjadi Prioritas 1 (P1) tetapi lebih tinggi dari plafon usulan anggaran

- Kegiatan : Promosi unggulan dan inovatif usulan Rp. 13 juta menjadi Rp. 20 juta
- Kegiatan : Kegiatan : Pengembangan konten kreatif digital berbasis Komunitas diusulkan Rp. 100Juta menjadi Rp. 130Juta naik dari usulan karena gabungan dengan kegiatan Fasilitasi pengembangan Inovasi/Iptek dinolkan

### BAB III

## TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN

#### A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

Adapun tujuan sasaran Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Renstra Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

|       |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Tujuan  | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akun-tabel berbasis teknologi informasi | Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi.                                                         |
| 1.1   | Sasaran | Meningkatnya keterbukaan informasi publik                                                                                    | Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik".                                                          |
| 1.1.1 | Program | Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber daya Komunikasi Publik                                | Persentase OPD / Urusan Pemerintahan / Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik |
|       |         |                                                                                                                              | Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya                                                                   |

|       |         |                                                                  |                                                                                                                               |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |                                                                  | Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.                                                |
|       |         | Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat, dan Penguatan KIP | Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik".                                                       |
|       |         |                                                                  | Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat.                                                    |
| 2.1.  | Sasaran | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik                             | Persentase OPD dengan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) "Baik".                                                                |
| 2.1.1 | Program | Pengembangan Infrastruktur TIK                                   | Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO)                         |
|       |         |                                                                  | Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustu dll) |
|       |         |                                                                  | Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)   |
| 2.1.2 |         | Pengembangan Data/ Informasi / Statitik Daerah                   | Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tercakup dalam Publikasi Data Statistik Tahunan                                       |
|       |         |                                                                  | Prosentase produsen data (OPD) yang berkontribusi dalam sistem satu data                                                      |
|       |         |                                                                  | Persentase OPD yang melakukan pengumpulan dan publikasi data                                                                  |

|       |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |                                                                                                              | sektoral (Profil OPD)                                                                                                                              |
| 2.2.  | Sasaran | Meningkatnya kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan | Jumlah penyelenggaraan capacity building bidang TIK bagi kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholder                                              |
| 2.2.1 | Program | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi                                                         | Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi .                                                         |
|       |         |                                                                                                              | Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi.                                          |
| 2.2.2 | Program | Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi                                                    | Persentase berita daerah yang lancar aman dan terjaga kerahasiannya.                                                                               |
| 2.3.  | Sasaran | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinkominfo.                                                  | Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)                                                                                         |
|       |         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                   | Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi. |
|       |         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                            | Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan peralatan kantor dan rumah tangga.                  |
|       |         | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                               | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja.                                                                                                   |

|  |  |                                                 |                                |
|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|  |  | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) | persentase kehadiran aparatur. |
|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------------|

#### B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan membandingkan antara pencapaian target dengan realisasi yang ada. Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dari 4 Indikator sasaran rincian capaian seluruh sasaran sebagai berikut :

| No | Indikator Sasaran                                                                           | Target | Nilai Cap. Kinerja s/d Juni | Keterangan                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik".                     | 20.51  | 10.25                       | Target : 39<br>Baik : 4<br>Tercapai : 4/43 |
| 2. | Persentase OPD dengan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) "Baik".                              | 50%    | 30%                         | Belum tercapai                             |
| 3. | Jumlah penyelenggaraan capacity building bidang TIK bagikelompok masyarakat dan stakeholder | 36%    | 24%                         | Belum tercapai                             |
| 4. | Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)                                  | BB     | BB                          | Tercapai                                   |
| 5. | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP                                                        | 2      | 2                           | Tercapai                                   |

#### C. Program dan Kegiatan (pada Tabel T-VI.C.10)

Didalam rumusan rencana program kegiatan bagi OPD tahun 2019 dan prakiraan maju 2020 Sebagai bahan evaluasi terdapat target (sesuai jenis sasaran dengan target indikator yang ingin dicapai), dimasing-masing kegiatan terdapat keluaran dan Hasil. Adapun kegiatan yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 dikarenakan kenaikan tarif tahunan dan standarisasi, selain itu juga kenaikan atau penurunan yang

membulatkan tidak dicantumkan hanya yang naik signifikan, diantaranya sebagai berikut :

1. Program administrasi perkantoran dengan anggaran naik pada kegiatan :
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (naik 50 juta selain Kominfo, RKB dan Batik TV)
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
  - Pembangunan rutin/berkala gedung kantor tahun 2019 usul tidak dipenuhi sehingga tahun 2020 diusulkan lagi finalisasi pembangunan gedung Dinas Kominfo sebesar Rp. 1.500.000.000,-
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. (Naik tidak signifikan menyesuaikan pagu Kota)
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
  - Prinsip belum disesuaikan karena kegiatan jasa tenaga kontrak berhubungan dengan kenaikan UMR dan Kegiatan Promosi kegiatan unggulan dan inovatif pagu diseragamkan se Kota mengingat keikutsertaan dalam event Kota.
5. Program Pengembangan Infrastruktur TIK 1
  - Fasilitas Pembangunan Pekalongan Smart City tahun 2019 menambah fasilitas sarana command center sebesar Rp. 250.000.000,- untuk biaya sewa aplikasi dan server sedangkan Tahun 2020 pagu Rp. 80.000.000,- perencana sewaktu menyusun belum ada sewa aplikasi sehingga sangat dimungkinkan naik karena sewa aplikasi tiap tahun Rp.185.000.000,- belum teranggarkan di tahun 2020 dengan dana itu hanya cukup untuk sosialisasi dan penambahan fasilitas sarana pendukung
  - Operasionalisasi Command Center (Tahun 2019 Rp. 450.000.000 dan 2020 Rp. 45.000.000 hanya pelaksanaan operasional command center)
  - Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika (Tahun 2019 hilang sebenarnya kegiatan ini merupakan satu-satunya aktifitas pada jabatan di Kasi pengelolaan sumber daya informatika (pembinaan warnet))
  - Pengembangan database indikator TIK semula Tahun 2019 Rp. 25.000.000 naik menjadi Rp. 35.000.000, merupakan gabungan dengan kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika (pembinaan warnet)

- Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas (semula tahun 2019 anggaran Rp. 130 juta menjadi 100 juta karena di tahun 2019 pagu sebesar Rp. 130.000.000,- digabung dengan kegiatan “Fasilitasi pengembangan inovasi/iptek ) sehingga anggarannya ditahun 2020 menjadi berkurang pagunya Rp. 100.000.000,-

#### 6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- Kegiatan yang di program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi semua kegiatan tidak naik signifikan hanya pembulatan naik keatas dan kebawah masih relatif

#### 7. Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP.

Kegiatan pada Program ini mengalami kenaikan/penurunannya tidak signifikan kecuali :

- Kegiatan : Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik turun dari pagu Rp. 698.000.000 menjadi 555.000.000,- dikarenakan adanya Belanja Modal
- Kegiatan : Penyelenggaraan LPPL Batik TV turun dari pagu Rp. 2.3011.400.000 menjadi 2.000.000.000,- dikarenakan adanya Belanja Modal

#### 8. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kegiatan pada program pengembangan data/informasi/statistik daerah masih tetap berjalan sesuai tahun sebelumnya

#### 9. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan

Program ini terdapat 2 kegiatan, yang naiknya signifikan pada kegiatan Pengembangan sistem keamanan informasi semula tahun 2019 pagu Rp. 284.000.000,- menjadi Rp. 84.000.000,- karena ada Belanja Modal sebesar Rp. 200.000.000,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja, sebagai bahan rencana yang berkelanjutan dan terarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyusun Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Tahun 2018.

Adapun pencapaian dari beberapa kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika tersusun beberapa program dan ditindaklanjuti beberapa kegiatan sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018 dapat terselesaikan. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2019 ini telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kota Pekalongan secara cascading berurutan dari Eselon IV (Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian) melaksanakan kegiatan sesuai dengan keluaran dan Eselon III mengemban program yang merupakan rekapitulasi kegiatan dengan indikator program dan Eselon II (Kepala Dinas) yang mempunyai sasaran dengan indikator dari Sekretaris/Bidang menuju tujuan dan terarah dalam misi dan mensukseskan visi Kota Pekalongan, tertuang dalam Perubahan RPJMD 2016-2021.

Demikian Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Terima kasih.

Pekalongan, 31 Agustus 2018  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pekalongan



**Dr. Sunardi Santoso, MSi**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19701214 199003 1 004

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 ini merupakan penyusunan yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 RPJMD Kota PEKalongan Tahun 2016 – 2021.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 ini, kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2019 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2019.

Pekalongan, 03 September 2018  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pekalongan



**Dr. Sri Budi Santoso, MSi**  
Kepala Muda  
Nip. 19701214 199003 1 004

## DAFTAR ISI

|                                                                               | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                       | 1       |
| a. Latar Berlakang .....                                                      | 1       |
| b. Landasan Hukum .....                                                       | 1       |
| c. Maksud dan Tujuan .....                                                    | 1       |
| d. Sistematika Penulisan .....                                                | 2       |
| <br>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....                  | <br>3   |
| 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra | 3       |
| 2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                           | 4       |
| 3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....    | 5       |
| 4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                     | 5       |
| 5. Dasar Usulan Awal Renja .....                                              | 6       |
| <br>BAB III. Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Kominfo .....          | <br>7   |
| A. Telaahan terhadap kebijakan Nasional .....                                 | 7       |
| B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                            | 10      |
| C. Program dan Kegiatan .....                                                 | 11      |
| <br>BAB IV. PENUTUP .....                                                     | <br>12  |

## DAFTAR LAMPIRAN

halaman

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| a. Lampiran I Tabel T.VI.C6 .....                                                       | 13 |
| Evaluasi Pelaksana Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra<br>Tahun 2017  |    |
| b. Lampiran II Tabel T.VI.C1                                                            |    |
| Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                            | 14 |
| c. Lampiran III Tabel T.VI.C10                                                          |    |
| Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Prakiraan Maju<br>Tahun 2018 ..... | 15 |
| d. Lampiran IV Tabel T.VI.C.9                                                           |    |
| Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018 .....                  | 16 |

**LAPORAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**  
**NOMOR 64A TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN**  
**TAHUN 2019**

**DINAS KOMINFO**      **RENCANA KERJA**  
-----  
**TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**